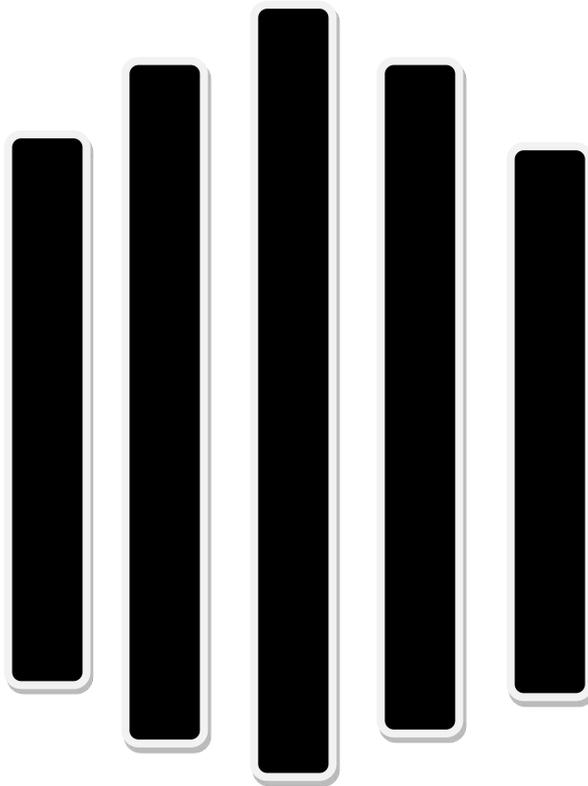




**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**



**KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 dapat tersusun sesuai dengan rencana. Penyusunan LKjIP sebagai pelaksanaan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, merupakan bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kami dalam tahun 2023.

Dengan tersusunnya LKjIP Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 ini, diharapkan akan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Kecamatan Kubutambahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta sekaligus sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKjIP yang kami susun ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami membuka diri untuk senantiasa menerima masukan, saran maupun kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunannya.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan LKjIP ini.

Kubutambahan, 27 Desember 2023

Plt. Camat Kubutambahan



I Nyoman Arya Lanang, Subahagia Putra, S.STP, M.AP

NIP. 19840523 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	8
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
2.3 Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran.....	17
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Langkah Perbaikan ke Depan	36
LAMPIRAN :	
1. Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan	
3. Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan sangat berperan untuk membantu Pemerintah Kabupaten di dalam pengendalian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Kubutambahan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 - 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi Kecamatan Kubutambahan, telah ditanda tangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Kecamatan Kubutambahan terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kecamatan Kubutambahan belum tercapai, yaitu seluruhnya dari 3 (tiga) indikator kinerja tidak mencapai target. Adapun Sasaran yang dimaksud adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan yang berkualitas dan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada pedoman yang diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kubutambahan diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang - undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaab Pembangunan Nasional
3. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang - undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Permen PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Bupati Buleleng nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Pemerintah Kecamatan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 10 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 70 Tahun 2020)
11. Peraturan Bupati Buleleng nomor 70 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 70 Tahun 2020)

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah telah dilaksanakan sehingga LKjIP merupakan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2023.
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 bagi upaya-upaya perbaikan dimasa mendatang.

LKjIP dapat memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan tentunya harus berupaya untuk dapat mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang *goodgovernance* sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, pemerintah kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- j) melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Kubutambahan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 kecamatan, 148 desa dan kelurahan. Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan sendiri terdiri 13 Desa, yakni Bukti,

Bulian, Kubutambahan, Bengkala, Bila, Tamblang, Pakisan, Bontihing, Depeha, Tunjung, Tajun, Mengening, Tambakan, dengan Pusat Pemerintahan terletak di Desa Kubutambahan.

Kedudukan Kecamatan dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan yang memiliki luas wilayah 118,24 km² dari luas Kabupaten Buleleng ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

Utara : Laut Bali,

Selatan : Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Barat : Kecamatan Sawan

Timur : Kecamatan Tejakula

1.5 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 menetapkan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng, antara lain mencakup pula Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan yang terdiri dari:

1. Camat : 1 orang dengan eselon III.a
2. Sekretaris Kecamatan : 1 orang dengan eselon III.b
3. Kepala Seksi : 5 orang dengan eselon IV.a
4. Kepala Sub Bagian : 2 orang dengan eselon IV.b
5. Jabatan Fungsional : -

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kecamatan Kubutambahan didukung oleh 53 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian personil berdasarkan Golongan

Golongan IV	:	1 orang
Golongan III	:	9 orang
Golongan II	:	4 orang
Golongan I	:	-
Jumlah		14 orang

b. Rincian personil berdasarkan Jabatan :

1. Struktural :

Eselon II	:	-
Eselon III	:	2 orang
Eselon IV	:	5 orang
2. Fungsional	:	-
3. Staf		
PNS	:	7 orang
Tenaga Honor	:	1 orang
Staf Harian	:	-
Staf Kontrak	:	38 orang
Jumlah		53 orang

54 Rincian personil menurut Pendidikan (PNS dan non PNS) :

Pendidikan	PNS	Non PNS	
		Tenaga Harian	Tenaga Kontrak
S3	-	-	-
S2	1	-	-
S1	6	-	5
Sarmud/D3	-	-	1
SLTA	7	-	33
SLTP	-	-	-
Jumlah	14	-	39

Untuk lebih jelasnya mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Perda Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2016

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Kubutambahan

Perencanaan yang disusun mengacu kepada Tugas Pokok dan fungsi pada Pemerintah Kecamatan. Di dalam Rencana Strategis tercakup uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Di samping itu perencanaan strategik juga diperlukan untuk menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif, memperluas landasan penentuan program dan kegiatan yang berkelanjutan, serta sebagai pedoman kerja bagi semua anggota Unit Kerja untuk mengantisipasi perkembangan masa depan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu Perencanaan Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam proses ini akan menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Kebijakan, program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Visi dan Misi

Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan, maka diperlukan visi dan misi yakni sebagai berikut:

1. Visi

Bahwa setiap organisasi Pemerintahan di dalam rangka pencapaian tujuan yang di tetapkan perlu memiliki Visi agar mampu eksis, antisifatif dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di dalam perkembangan global.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan agar organisasi /

instansi tetap eksis. Mengingat tugas – tugas Pemerintah Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat kompleks, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan Kecamatan Kubutambahan mengadopsi Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2023 yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”.

2. Misi

Sebagai penjabaran terhadap visi Pemerintah Kecamatan Kubutambahan dalam mewujudkan masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing yang berlandaskan Tri Hita Karana maka sangat dibutuhkan kajian potensi, permasalahan serta koordinasi dengan unit pelaksana teknis dinas dan kegiatan lintas sektoral desa/kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Kubutambahan, sehingga terwujud pelaksanaan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berkualitas.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan, maka Misi yang dilaksanakan adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Professional, Berbudaya dan Berintegritas”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dengan di tetapkannya misi tersebut maka di dalam upaya mencapainya ditentukan tujuan yang akan mengarah pada perumusan sasaran dan kebijakan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Upaya untuk meningkatkan akutabilitas, Pemerintah Kecamatan Kubutambahan telah menetapkan indikator kerja dengan memperhatikan tugas dan fungsi, pelimpahan kewenangan, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hal tersebut selanjutnya

menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023.

Adapun Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kecamatan Kubutambahan sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Kecamatan Kubutambahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	85%	90%	95%	100%
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi baik	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	100%	100%	100%	100%
4		Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum	100%	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut maka perlu dibuat program-program yang selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun program dan Kegiatan serta sub kegiatan untuk Tahun 2023 adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 5 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Secara sederhana Indikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai.

Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi.

Pemilihan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kubutambahan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu: Spesifik, Dapat dicapai, Relevan, Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan Dapat dikualifikasi dan diukur

Untuk lebih jelasnya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 data dilihat pada Tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM HITUNGAN	SUMBER DATA	PENGANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey	Camat Kubutambahan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi baik	Realisasi desa dengan laporan pertanggung-jawaban keuangan yang baik	Hasil Evaluasi	Camat Kubutambahan
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat		Hasil Evaluasi	Camat Kubutambahan
4	Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum	Realisasi Desa dengan Status Maju dan Mandiri	Hasil Evaluasi	Camat Kubutambahan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja sebagai wujud komitmen dalam hubungan meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Pemerintah Kecamatan Kubutambahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	85
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi baik	%	100
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	%	100
3	Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum	%	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kubutambahan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kubutambahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik atau akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Kubutambahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra Tahun 2017-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja Kecamatan Kubutambahan didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2023, Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	85%	85%	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi baik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	100%	100%	100%
4	Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum	100%	100%	100%

Capaian Kinerja Berdasarkan Kinerja Tahun Lalu.

Tabel 3.2.1 Realisasi kinerja tahun 2021 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022	2023	%
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	85%	85%	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi baik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	100%	100%	100%

4	Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum	100%	100%	100%
---	--	---------------------------------	------	------	------

Adapun pencapaian kinerja tahun 2023 terhadap pencapaian tahun 2021 adalah masih sama, tidak ada peningkatan. Namun pencapaian Year of Year (YoY) atau tahun ke tahun secara umum ada peningkatan.

1. Capaian kinerja berdasarkan target akhir Renstra tahun 2023

Tabel 3.2.2 Realisasi Kinerja tahun 2023 dan Target Akhir Renstra 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	2023	%
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	85%	85%	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi baik	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	100 %	100 %	100 %
4	Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran tidak tercapai secara maksimal.

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi Kinerja dimulai dengan menentukan nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran didasarkan nilai capaian kinerja tersebut.

Pengukuran Kinerja Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan periode tahun 2023 merupakan gambaran yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh atasan langsung sebagai pemberi tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kubutambahan yaitu antara Bupati Buleleng sebagai

pihak pemberi tugas dengan Camat sebagai pimpinan pada SKPD sebagai penerima tugas.

Analisis capaian kinerja merupakan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi, misi yang telah ditetapkan. Analisis kinerja Kecamatan Kubutambahan menjelaskan perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah analisis capaian kinerja Kecamatan Kubutambahan tahun 2023:

3.1.1.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Sangat Baik	Baik	90 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis 1 tidak mencapai target.

Didalam sasaran 1 kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik. Rumusan yang digunakan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor: 14 Tahun 2017 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Metode digunakan dalam pengumpulan survey ini dengan menggunakan kuisisioner

Kuesioner yang terkumpul berjumlah 100 lembar yang telah diisi dengan lengkap oleh responden. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kubutambahan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Kubutambahan sebesar 81.92 berada pada kategori “BAIK” (pada interval 76.61 s/d 88,30). Hasil survei secara lengkap dapat dilihat dari tabel pengolahan data sebagai berikut.

Tabel 3.3.2 Pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun 2023.

<u>Keterangan :</u>	
- U1 s.d U9	: Unsur- Unsur Pelayanan

- NRR	: Nilai Rata-rata
- IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
- *)	: Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **)	: Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	: NRR per Unsur x 0,111
IKM UNIT PELAYANAN	: 81,92 B (Baik)
Mutu Pelayanan	:
A (Sangat Baik)	: 88.31-100
B (Baik)	: 76.61 – 88.30
C (Kurang Baik)	: 65.00 – 76.60
D (Tidak Baik)	: 25.00 – 64.99

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan unsur pelayanan, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan unsur tersebut;

NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NRR	MUTU	PERINGKAT
1	2	3	4	5
U1	Persyaratan	3.22	B	4
U2	Prosedur	3.19	B	7
U3	Waktu Pelayanan	3.14	B	8
U4	Biaya / Tarif	3.95	A	1
U5	Produk Layanan	3.23	B	3
U6	Kompetensi Pelaksana	3.22	B	5
U7	Perilaku Pelaksana	3.22	B	6
U8	Sarana dan Prasarana	3.04	C	9
U9	Penanganan Pengaduan	3.58	A	2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas kinerja pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan pada Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng dapat dikategorikan BAIK dengan perolehan indeks kepuasan masyarakat sebesar 81,92 berada dalam interval 76,61 – 88,30. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 adalah Sangat Baik (Minimal Nilai 88,31), sehingga pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 92%.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai yang paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan :

Nilai dalam kelompok paling rendah harus ditingkatkan yaitu pada unsur 8 (delapan) yaitu Sarana dan Pra sarana dengan rata-rata tertimbang 3.04. Hal itu disebabkan masih dianggap kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pelayanan masih belum maksimal.

Solusi untuk permasalahan ini adalah menganalisa kembali sarana dan prasarana yang masih belum memadai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk kemudian dilengkapi atau di anggarkan.

Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur 4 (empat) yaitu tarif/biaya dengan nilai rata-rata tertimbang 3.95. Unsur ini menjadi unggul karena Kecamatan Kubutambahan dalam memberikan pelayanan, tidak ada pemungutan biaya apapun.

Kepuasan masyarakat merupakan fokus utama bagi Kecamatan Kubutambahan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan. Penerapan standar pelayanan diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

3.1.1.2 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	100	90	90

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis 2 tidak mencapai target.

Didalam sasaran 2 kinerja yang ingin dicapai adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehubungan indikator Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik mencapai 90% dari Target 100%, dimana dari 13 desa binaan masih ada satu desa yang perlu mendapat pembinaan lanjutan untuk meningkatnya tata administrasi desa, terutama dari sisi dokumen-dokumen perencanaan yang memang secara regulasi harus terpenuhi dan disusun berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui prosentase desa /kelurahan dengan administrasi yang baik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

- a. Prosentase desa yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tepat waktu;
- b. Prosentase Desa yang menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tepat waktu;
- c. Prosentase desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu;
- d. Prosentase desa yang menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes) tepat waktu.
- e. Prosentase desa yang menerbitkan LKPP Desa tepat waktu ;
- f. Prosentase desa yang menerbitkan IPP Desa tepat waktu;
- g. Prosentase desa yang menerbitkan pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu.

3.1.1.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri	100	85	85

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis 3 tidak mencapai target.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling

mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Didalam sasaran 3 kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa . Sehubungan indikator Persentase Desa dengan IDM Status Maju dan Mandiri, Kecamatan Kubutambahan mengukur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Hal ini dilakukan agar lebih akuntabel jika dibandingkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pilihan ini didasarkan bukan pada substansi peraturannya, tetapi lebih kepada metode penilaiannya. Walaupun sama- sama dilakukan pengisian indicator oleh masing- masing desa, namun berbeda dalam verifikasi. Jika mengacu pada permendagri, pengisian masih dilakukan secara manual dan diverifikasi secara manual juga sehingga berpotensi kurang objektif dan rawan kekeliruan. Kelebihan permendesa dalam input data secara online juga diverifikasi secara berjenjang yang melibatkan kecamatan, provinsi dan kementerian, sehingga dianggap lebih akuntabel.

Indeks ketahanan Sosial yang terdiri dari dimensi modal sosial yang terdiri dari indikator solidaritas social, toleransi, keamanan penduduk, kesejahteraan social, dimensi kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan, dimensi pendidikan terdiri dari akses pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal, akses ke pengetahuan dan dimensi pemukiman dengan kriteria akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik dan akses ke informasi komunikasi.

Indeks ketahanan Ekonomi yang terdiri dari dimensi ekonomi dengan indikator keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat perdagangan, distribusi logistic, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Indek ketahanan lingkungan yang terdiri dari dimensi ekologi dengan indikator kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana.

Sedangkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai dasar penetapan desa kinerja baik adalah tertinggi Desa Kekeran. Fokus peningkatan kinerja berikutnya yaitu meningkatkan status desa berkembang yang terdiri dari 6 (enam) menjadi desa maju.

3.2 Realisasi Anggaran.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya pada Kecamatan Kubutambahan sangat tergantung dari bantuan keuangan daerah melalui APBD Kabupaten Buleleng. Kecamatan Kubutambahan pada Tahun 2023 setelah perubahan melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan serta mengelola anggaran belanja dengan pagu sebesar Rp. 3.752.419.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.248.239.235,- atau dengan capaian sebesar 86,56%. Rekapitulasi realisasi anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN KECAMATAN
KUBUTAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Belanja Daerah			
1	- Belanja Pegawai	1.905.954.063,00	1.829.767.176,00	96
2	- Belanja Barang dan Jasa	1.778.359.559,00	1.418.472.059	79,76
3	- Belanja Modal	68.105.878,00	0	0
	JUMLAH	3.752.419.500,00	3.248.239.235,00	86,56

Secara umum, akuntabilitas keuangan Kecamatan Kubutambahan sudah baik karena kemampuan menyerap anggaran Belanja Daerah, dimana dari 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan mampu menyerap anggaran 86,56 persen. Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Kubutambahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	3.096.977.112	2.681.610.478	86.59

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	121.787.232	110.950.760	91.10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	121.787.232	110.950.760	91.10
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.032.866.295	1.941.717.936	95.52
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.905.954.063	1.829.767.176	96
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	121.787.232	110.950.760	91.10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	5.125.000	1.000.000	19.51
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	352.398.924	197.967.071	56.18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	13.411.750	4.013.800	29.93
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	68.105.878	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	238.730.396	181.153.771	75.88
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	9.545.900	2.211.500	23.17
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	5.915.000	5.148.000	87.03
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	10.000.000	4.000.000	40
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	6.690.000	1440.000	21.52
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	449.798.097	383.479.101	85.26
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	267.462.308	235.602.850	88.09
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	50.275.000	43.934.501	87.39
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	79.554.589	66.850.000	84.03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	52.506.200	37.091.750	70.64
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	140.126.564	47.495.610	33.89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	79.816.562	33.819.410	44.03
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	29.170.000	13.676.200	46.88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	34.140.002	0	0
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	84.941.844	79.148.330	93.18
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	84.941.844	79.148.330	93.18
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	84.941.844	79.148.330	93.18

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	123.117.646	110.632.420	89.86
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	123.117.646	110.632.420	89.86
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	13.650.000	11585.000	84.87
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	109.467.644	99.047.420	90.48
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	168.162.402	140.130.655	83.33
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	19.270.000	5.000.000	25.95
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	19.270.000	5.000.000	25.95
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	148.892.402	135.130.655	90.76
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	148.892.402	135.130.655	90.76
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	279.220.496	236.717.352	84.78
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	279.220.496	236.717.352	84.78
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	127.758.292	117.649.440	92.09
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	24.175.000	15.831.500	65.49
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	99.187.204	90.142.912	90.88
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	24.000.000	11.000.000	45.83
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	4.100.000	2.093.500	51.06
JUMLAH TOTAL			3.752.419.500	3.248.239.235	86.56

Untuk mengetahui realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kubutambahan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.4 Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100%	93.18%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi baik	100 %	84.78 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	100%	89.86%
4	Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum	100 %	83.33 %

Tabel 3.3.5 Realisasi Anggaran Per Indikator

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	84.941.844	79.148.330	93.18
2	Persentase Desa dengan Administrasi baik	279.220.496	236.717.352	84.78
3	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	123.117.646	110.632.420	89.86
4	Persentase Penanganan Trantibum	168.162.402	140.130.655	83.33

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.6 Capaian Target Kinerja dan Efisiensinya

No	Kategori	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%	Anggaran	
					Realisasi	%
A	Indikator Sasaran 1	100%	100%	100 %	79.148.330	93.18
1	Melebihi Target					
2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
B	Indikator Sasaran 2	100 %	100 %	100 %	236.717.352	84.78
1	Melebihi Target					
2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
C	Indikator Sasaran 3	100 %	100 %	100 %	110.632.420	89.86
1	Melebihi Target					

2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
D	Indikator Sasaran 4	100 %	100 %	100 %	140.130.655	83.33
1	Melebihi Target					
2	Sesuai Target					
3	Tidak mencapai target					
	Rata - Rata			100		87,78
	Tingkat Efisiensi					12.22

Secara umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, meskipun belum mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Secara anggaran ada efisiensi sebesar 12.22 % antara kinerja dengan anggaran yang diserap. Untuk ke depannya diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan. Kesimpulannya bahwa anggaran yang digunakan sudah efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi 12.22 %.

Untuk hasil capaian kinerja pada tahun 2023 ini, selain karena faktor program dan kegiatan prioritas serta anggaran yang mencukupi juga didukung adanya komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kubutambahan dengan memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung terrealisasinya target kinerja indikator kinerja utama, tanpa mengabaikan program/kegiatan lainnya.

Untuk indikator kinerja yang capaian kerjanya belum tercapai sesuai dengan target, tidak lain karena belum optimalnya pelaksanaan sumber daya yang ada. Kedepan Kecamatan Kubutambahan akan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya yang bersifat internal maupun sumber daya yang bersifat eksternal. Selain itu, pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang menjadi penunjang capaian kinerja akan ditingkatkan pelaksanaannya secara lebih efektif dan tepat sasaran dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Dengan demikian diharapkan hasil capaian indikator kinerja akan tercapai sesuai dengan target yang diinginkan kedepannya

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Kubutambahan merupakan laporan Pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Kubutambahan dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Kubutambahan Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kubutambahan pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Dengan telah dibuatnya LKjIP Kecamatan Kubutambahan, maka akan dapat diketahui seberapa besar kinerja yang telah dicapai oleh SKPD, dengan harapan dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Selanjutnya jika dilihat secara umum Kecamatan Kubutambahan dalam Tahun Anggaran 2023 capaian kinerja dan sasaran telah mampu mewujudkan kinerja dengan kategori baik serta secara khusus capaian kinerja yang telah dicapai akan menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan program berikutnya terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, budaya dan berintegritas berlandaskan Tri Hita Karana.

Namun dari keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan, yang kiranya perlu untuk ditindaklanjuti:

- 1) Masih ada desa yang terlalu lemah dalam pengadministrasian karena adanya ketumpang tindihan dalam membuat laporan administrasi disamping itu pula koordinator kurang tegas dalam memberikan tupoksi kepada perangkat yang lain.
- 2) IDM Status Maju dan Mandiri belum tercapai karena beberapa indeks yang jadi penentu belum terpenuhi di tingkat Desa, baik itu terkait Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada maka strategi yang Dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal pembuatan administrasi dan pemahaman tupoksi Perangkat Desa.
- 2) Intervensi kegiatan secara berkelanjutan baik itu dari Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
AN KUBUTAMBAHAN- KUBUTAMBAHAN, TELP.
21745

www.kbtbulelengkab.go.id
email: kbt@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah in :

Nama : PUTU MARJAYA, S.Sos

Jabatan : Plt. Camat Kubutambahan

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. KETUT LIHADNYANA, M.M.A

Jabatan : Pj. Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kubutambahan, 26 Oktober 2023



Ir. KETUT LIHADNYANA, M.M.A
Pembina Utama Madya (IV/c)



PUTU MARAYA, S.Sos
Pembina (IV/a)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PEMERINTAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	85
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi yang baik	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat	100%
Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan Trantibum	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 89.941.844	
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 123.117.646	
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 168.162.402	
4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 279.220.496	
TOTAL	Rp 655.442.388	

Kubutambahan, 26 Oktober 2023

Pihak Kedua,



Ir. KETUT LIHADNYANA, M.M.A
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19650601 199203 1 001

PIHAK PERTAMA



PUTU MARAYA, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19651012 198603 1 018

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	85	Camat Kubutambahan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi baik	%	100	Camat Kubutambahan
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	%	100	Camat Kubutambahan
6	Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum	%	100	Camat Kubutambahan

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KE T	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CAMAT																
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai	85	Januari	-	-	-	-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84,941,844	Januari	-	-		
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	5,453,487	-		
					Maret	-	-	-				Maret	11,106,974	5,453,487		49
					April	-	-	-				April	16,560,461	10,906,974		66
					Mei	-	-	-				Mei	22,013,948	16,360,458		74
					Juni	-	-	-				Juni	31,154,935	27,267,426		88
					Juli	-	-	-				Juli	36,608,410	34,370,910		94
					Agustus	-	-	-				Agustus	45,549,397	42,820,910		94
					September	-	-	-				September	54,690,384	48,274,394		88
					Oktober	-	-	-				Oktober	60,143,871	54,477,878		91
					Nopember	-	-	-				Nopember	70,347,358	59,931,362		85
					Desember	-	-	-				Desember	79,488,345	-		-
						85	85	100				Desember	84,941,844	79,148,330		93
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa dengan Administrasi baik	%	100	Januari	-	-	-	-	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	279,220,496	Januari	-	-		
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	35,841,583	-		
					Maret	-	-	-				Maret	57,092,666	38,441,584		67
					April	-	-	-				April	85,021,249	54,720,168		64
					Mei	-	-	-				Mei	100,043,332	69,148,744		69
						-	-	-			Mei	123,709,415	101,255,896	82		

					Juni	-	-	-				Juni	137,137,998	122,684,472	89
					Juli	-	-	-				Juli	151,016,581	123,027,972	81
					Agustus	-	-	-				Agustus	178,563,914	188,956,548	106
					September	-	-	-				September	198,992,497	155,385,124	78
					Oktober	-	-	-				Oktober	232,494,580	181,923,700	78
					Nopember	-	-	-				Nopember	257,541,913	-	-
					Desember	100	100	100				Desember	279,220,496	236,717,352	85
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat	%	100	Januari	-	-	-		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	123,117,646	Januari	3,635,658	-	-
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Maret	-	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					April	-	-	-				April	20,321,882	17,406,972	86
					Mei	-	-	-				Mei	39,007,540	24,678,284	63
					Juni	-	-	-				Juni	42,643,198	33,813,940	79
					Juli	-	-	-				Juli	46,278,856	52,958,190	114
					Agustus	-	-	-				Agustus	53,789,514	74,927,296	139
					September	-	-	-				September	60,425,172	81,062,952	134
					Oktober	-	-	-				Oktober	82,096,330	92,573,608	113
					Nopember	-	-	-				Nopember	109,481,988	-	-
					Desember	100	100	100				Desember	123,117,646	110,632,420	90
4	Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Trantibum	%	100	Januari	-	-	-	-	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	168,162,402	Januari	11,951,451	-	-
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	25,152,902	11,951,450	48
					Maret	-	-	-				Maret	37,519,103	23,902,900	64
					April	-	-	-				April	49,470,554	35,854,345	72
					Mei	-	-	-				Mei	66,422,005	62,057,235	93
					Juni	-	-	-				Juni	78,373,456	74,008,680	94

					Juli	-	-	-			Juli	90,324,907	-	-	
					Agustus	-	-	-			Agustus	102,276,358	85,960,125	84	
					September	-	-	-			September	116,227,809	100,611,570	87	
					Oktober	-	-	-			Oktober	138,259,510	114,227,765	83	
					Nopember	-	-	-			Nopember	153,210,961	-	-	
					Desember	100	100	100			Desember	168,162,402	140,130,655	83	

SEKRETARIS KECAMATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KE T	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Jumlah Laporan AKIP yang baik	Dokumen	50	Januari	10	10	100			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121,787,232	Januari	10,086,436	-	-		
					Pebruari	3	3	100					Pebruari	20,172,872	10,086,436	50		
					Maret	3	3	100					Maret	30,259,308	20,172,872	67		
					April	3	3	100					April	40,345,744	30,259,304	75		
					Mei	3	3	100					Mei	50,432,180	50,432,168	100		
					Juni	3	3	100					Juni	60,518,616	60,518,600	100		
					Juli	3	3	100					Juli	70,605,052	-	-		
					Agustus	3	3	100					Agustus	80,691,488	70,605,032	87		
					September	3	3	100										
					Oktober	7	7	100										
					Nopember	3	3	100										
					Desember	6	6	100										
				Persentase Penyebaran Kuisisioner pengguna layanan	%	100	Januari	-	-	-								
							Pebruari	-	-	-								
					Maret	-	-	-										

			April	-	-	-								
			Mei	-	-	-								
			Juni	-	-	-								
			Juli	-	-	-								
			Agustus	-	-	-								
			September	-	-	-								
			Oktober	-	-	-								
			Nopember	-	-	-								
			Desember	100	100	100								
			Januari	2	2	100								
			Pebruari	2	2	100								
			Maret	4	4	100								
			April	4	4	100								
			Mei	2	2	100								
			Juni	1	1	100								
			Juli	1	1	100								
			Agustus	3	3	100								
			September	1	1	100								
			Oktober	1	1	100								
			Nopember	1	1	100								
			Desember	1	1	100								
			Januari	4	4	100								
			Pebruari	4	4	100								
			Januari	270,388,681	-	-								
			Pebruari	446,363,943	173,972,951	39								
			Maret	683,408,852	438,088,774	64								
			April	924,477,111	709,388,791	77								
			Mei	1,149,276,787	874,643,303	76								
			Juni	1,310,705,539	1,118,813,336	85								
			Juli	1,472,580,735	1,255,325,687	85								
			Agustus	1,630,075,742	1,395,863,160	86								
			September	1,787,570,749	1,532,264,318	86								
			Oktober	1,925,718,798	1,668,715,250	87								
			Nopember	2,022,779,859	1,805,316,219	89								
			Desember	2,032,866,295	1,941,717,936	96								
			Januari	4,536,113	-	-								
			Pebruari	54,262,861	37,138,629	68								

	sesuai ketentuan			Maret	4	4	100				Maret	59,633,974	44,756,487	75					
				April	3	3	100				April	71,815,087	58,339,643	81					
				Mei	3	3	100				Mei	87,242,690	42,863,984	49					
				Juni	3	3	100				Juni	103,558,319	81,902,311	79					
				Juli	3	3	100				Juli	137,239,432	89,082,311	65					
				Agustus	4	4	100				Agustus	168,920,545	109,500,967	65					
				September	3	3	100				September	181,601,658	133,575,503	74					
				Oktober	4	4	100				Oktober	323,196,103	164,021,159	51					
				Nopember	4	4	100				Nopember	337,577,816	194,331,415	58					
				Desember	4	4	100				Desember	352,398,924	197,967,071	56					
				Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Dokumen	24	Januari				2	2	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449,798,097	Januari	29,777,063	-	-
							Pebruari				2	2	100			Pebruari	65,206,317	34,450,860	53
	Maret	2	2				100	Maret	100,234,463	68,335,119	68								
	April	2	2				100	April	133,449,364	91,966,867	69								
	Mei	2	2				100	Mei	169,919,273	153,600,463	90								
	Juni	2	2				100	Juni	201,696,375	193,233,711	96								
	Juli	2	2				100	Juli	234,223,494	205,098,611	88								
	Agustus	2	2				100	Agustus	276,008,075	233,947,859	85								
	September	2	2				100	September	317,614,721	262,815,607	83								
	Oktober	2	2				100	Oktober	366,999,253	294,574,355	80								
	Nopember	2	2				100	Nopember	411,459,532	357,256,353	87								
	Desember	2	2				100	Desember	449,798,097	383,479,101	85								
	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Penyusunan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai	%	100	Januari	-	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,126,564	Januari	5,420,834	-	-						
				Pebruari	-	-	-			Pebruari	12,699,668	594,500	5						
				Maret	-	-	-			Maret	20,408,002	-	-						

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KE T	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		ketentuan			April	-	-	-				April	26,116,336	6,717,500	26			
					Mei	-	-	-				Mei	30,861,170	14,573,910	47			
					Juni	-	-	-				Juni	35,569,504	14,815,410	42			
					Juli	-	-	-				Juli	42,295,338	17,058,410	40			
					Agustus	-	-	-				Agustus	50,021,172	-				
					September	-	-	-				September	56,747,006	23,129,910	41			
					Oktober	-	-	-				Oktober	126,593,234	24,147,910	19			
					Nopember	-	-	-				Nopember	134,079,901	47,495,610	35			
					Desember	100	100	100				Desember	140,126,564	-				
Kasubbag Perencanaan																		
1	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi	dokumen	12	Januari	1	1	100		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121,787,232	Januari	10,086,436	-	-			
					Pebruari	1	1	100						Pebruari	20,172,872	10,086,436	50	
					Maret	1	1	100						Maret	30,259,308	20,172,872	67	
					April	1	1	100						April	40,345,744	30,259,304	75	
					Mei	1	1	100										
					Juni	1	1	100										
					Juli	1	1	100										
					Agustus	1	1	100										
					September	1	1	100										
					Oktober	1	1	100										
					Nopember	1	1	100										
					Desember	1	-	-										
2	Tersedianya dokumen Perencanaan dan anggaran	Jumlah Dokumen perencanaan sesuai ketentuan	dokumen	9	Januari	7	7	100										
					Pebruari	-	-	-										
					Maret	-	-	-										
					April	-	-	-										
					Mei	-	-	-										
					Juni	-	-	-										
					Juli	-	-	-										
					Agustus	-	-	-										

					Maret	1	1	100			Mei	50,432,180	50,432,168	100	
					April	1	1	100			Juni	60,518,616	60,518,000	100	
					Mei	1	1	100			Juli	70,605,052	70,605,032	100	
					Juni	1	1	100			Agustus	80,691,488	-	-	
					Juli	1	1	100			September	90,777,924	80,691,464	89	
					Agustus	1	1	100			Oktober	101,614,360	90,777,896	89	
					September	1	1	100			Nopember	111,700,796	100,864,328	90	
					Oktober	1	1	100			Desember	121,787,232	110,950,760	91	
					Nopember	1	1	100		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Januari	-	-	-	
					Desember	1	-	-			5,125,000	Pebruari	-	-	-
											Maret	-	-	-	-
											April	1,000,000	-	-	-
											Mei	-	-	-	-
											Juni	-	1,000,000	100	-
											Juli	-	-	-	-
											Agustus	-	-	-	-
											September	-	-	-	-
											Oktober	4,125,000	-	-	-
											Nopember	5,125,000	-	-	-
											Desember	-	-	-	-
3	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah laporan administrasi BMD	Laporan	12	Januari	1	1	100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Januari	-	-	-	
											13,411,750	Pebruari	993,890	-	-
											Maret	-	-	-	-
											April	-	-	-	-
											Mei	2,767,200	-	-	-
											Juni	-	2,767,200	100	-
											Juli	-	-	-	-
											Agustus	-	-	-	-
											September	-	-	-	-
											Oktober	-	-	-	-

								September	-	-	-
								Oktober	7,500,000	-	-
								Nopember	10,000,000	-	-
								Desember	-	-	-
								Januari	6,329,787	-	-
								Pebruari	12,659,574	6,295,000	50
								Maret	18,989,361	12,590,000	66
								April	25,319,148	12,590,000	50
								Mei	31,648,935	25,180,000	80
								Juni	37,978,722	31,475,000	83
								Juli	45,308,509	37,770,000	83
								Agustus	52,638,296	44,065,000	84
								September	58,968,083	50,360,000	85
								Oktober	66,297,870	56,655,000	85
								Nopember	73,224,804	64,250,000	88
								Desember	79,554,589	66,850,000	84
			Agustus	1	1	100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		79,554,589		
								Januari	-	-	-
								Pebruari	4,397,108	-	-
								Maret	-	-	-
								April	6,268,113	-	-
								Mei	11,705,876	-	-
								Juni	-	11,374,000	97
								Juli	-	-	-
								Agustus	19,708,311	-	-
								September	24,787,811	-	-
								Oktober	34,613,864	13,600,000	39
								Nopember	45,694,850	37,091,750	81
								Desember	52,506,200	-	-
			September	1	1	100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		52,506,200		
								Januari	4,646,667	-	-
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		76,816,562		

					Oktober	1	1	100							
					Nopember	1	1	100							
					Desember	-	-	-							
5	Terlaksananya Pembinaan PKK	Jumlah Laporan Pembinaan PKK	Laporan	3	Januari	-	-	-				Oktober	16,000,000	6,250,000	39
					Pebruari	-	-	-				Nopember	20,000,000	11,000,000	55
					Maret	-	-	-				Desember	24,000,000	-	-
					April	1	1	100				Januari	-	-	-
					Mei	-	-	-				Pebruari	-	-	-
					Juni	-	-	-				Maret	-	-	-
					Juli	1	1	100				April	2,875,000	-	-
					Agustus	-	-	-				Mei	5,875,000	-	-
					Septembe r	-	-	-				Juni	-	5,500,000	94
					Oktober	-	-	-				Juli	-	8,000,000	0.84
					Nopember	1	-	100				Agustus	8,750,000	-	-
					Desember	-	-	-				Septembe r	-	-	-
					Januari	-	-	-				Oktober	10,775,000	10,625,000	99
					Pebruari	-	-	-				Nopember	13,650,000	11,585,000	85
					Maret	-	-	-				Desember	-	-	-
					April	1	-	-				Januari	3,635,658	-	-
					Mei	-	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Juni	-	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Agustus	1	1	100				April	17,446,882	17,406,972	100
					Septembe r	-	-	-				Mei	-	-	-
					Oktober	1	1	100				Januari	3,635,658	-	-
					Nopember	-	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Desember	1	1	100				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Januari	-	-	-				April	17,446,882	17,406,972	100
					Pebruari	-	-	-				Mei	-	-	-
					Maret	-	-	-				Januari	3,635,658	-	-
					April	1	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Mei	-	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Juni	-	-	-				April	17,446,882	17,406,972	100
					Agustus	1	1	100				Mei	-	-	-
					Septembe r	-	-	-				Januari	3,635,658	-	-
					Oktober	1	1	100				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Nopember	-	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Desember	1	1	100				April	17,446,882	17,406,972	100
					Januari	-	-	-				Mei	-	-	-
					Pebruari	-	-	-				Januari	3,635,658	-	-
					Maret	-	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					April	1	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Mei	-	-	-				April	17,446,882	17,406,972	100
					Juni	-	-	-				Mei	-	-	-
					Agustus	1	1	100				Januari	3,635,658	-	-
					Septembe r	-	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Oktober	1	1	100				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Nopember	-	-	-				April	17,446,882	17,406,972	100
					Desember	1	1	100				Mei	-	-	-
Kasi Sosial Budaya															
1	Penyusunan Laporan Kegiatan di Bidang Kehidupan Keagamaan, Kelompok Adat dan Budaya	Laporan Kegiatan di Bidang Kehidupan Keagamaan, Kelompok Adat dan Budaya	Laporan	12	Januari	1	1	100				Januari	3,635,658	-	-
					Pebruari	1	1	100				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Maret	1	1	100				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					April	1	1	100				April	17,446,882	17,406,972	100
					Mei	1	1	100				Mei	-	-	-
					Juni	1	1	100				Januari	3,635,658	-	-
					Juli	1	1	100				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Agustus	1	1	100				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Septembe r	1	1	100				April	17,446,882	17,406,972	100
					Oktober	-	-	-				Mei	-	-	-
					Nopember	-	-	-				Januari	3,635,658	-	-
					Desember	1	1	100				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Januari	-	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Pebruari	-	-	-				April	17,446,882	17,406,972	100
					Maret	-	-	-				Mei	-	-	-
					April	1	-	-				Januari	3,635,658	-	-
					Mei	-	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Juni	-	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Agustus	1	1	100				April	17,446,882	17,406,972	100
					Septembe r	-	-	-				Mei	-	-	-
					Oktober	1	1	100				Januari	3,635,658	-	-
					Nopember	-	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Desember	1	1	100				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Januari	-	-	-				April	17,446,882	17,406,972	100
					Pebruari	-	-	-				Mei	-	-	-
					Maret	-	-	-				Januari	3,635,658	-	-
					April	1	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Mei	-	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Juni	-	-	-				April	17,446,882	17,406,972	100
					Agustus	1	1	100				Mei	-	-	-
					Septembe r	-	-	-				Januari	3,635,658	-	-
					Oktober	1	1	100				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Nopember	-	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Desember	1	1	100				April	17,446,882	17,406,972	100
					Januari	-	-	-				Mei	-	-	-
					Pebruari	-	-	-				Januari	3,635,658	-	-
					Maret	-	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					April	1	-	-				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Mei	-	-	-				April	17,446,882	17,406,972	100
					Juni	-	-	-				Mei	-	-	-
					Agustus	1	1	100				Januari	3,635,658	-	-
					Septembe r	-	-	-				Pebruari	7,665,566	5,385,658	70
					Oktober	1	1	100				Maret	11,436,224	9,021,316	79
					Nopember	-	-	-				April	17,446,882	17,406,972	100
					Desember	1	1	100				Mei	-	-	-

					September	1	1	100					
					Oktober	1	1	100					
					November	1	1	100					
					Desember	1	1	100					
3	Tersusunnya Laporan Pembinaan Linmas Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Linmas Desa	Laporan	4	Januari	-	-	-					
					Pebruari	-	-	-					
					Maret	1	1	100					
					April	-	-	-					
					Mei	-	-	-					
					Juni	1	1	100					
					Juli	-	-	-					
					Agustus	-	-	-					
					September	1	1	100					
					Oktober	-	-	-					
					November	-	-	-					
					Desember	1	1	100					
4	Tersusunnya Laporan Penanganan Bencana Alam	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Alam	Laporan	12	Januari	1	1	100					
					Pebruari	1	1	100					
					Maret	1	1	100					
					April	1	1	100					
					Mei	1	1	100					
					Juni	1	1	100					
					Juli	1	1	100					
					Agustus	1	1	100					
					September	1	1	100					
					Oktober	1	1	100					
					November	1	1	100					
					Desember	1	1	100					
5	Terlaksananya Koordinasi sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	Januari	-	-	-					
					Pebruari	-	-	-					
					Maret	1	1	100					
					April	-	-	-					
					Mei	-	-	-					
					Juni	1	1	100					
					Juli	-	-	-					
					Agustus	-	-	-					
					September	1	1	100					
					Oktober	-	-	-					
					November	-	-	-					
					Desember	1	1	100					
					Maret	-	-	-					
					April	-	-	-					
					Mei	5,000,000	2,300,000	46					
					Juni	-	-	-					
					Juli	-	-	-					
					Agustus	-	-	-					
					September	7,000,000	5,000,000	71					
					Oktober	13,270,000	-	-					
					November	16,270,000	-	-					
					Desember	19,270,000	-	-					

Kasi Pemerintahan																	
1	Tersusunnya Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum serta Pembinaan Keagrariaan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum serta Pembinaan Keagrariaan	Laporan	12	Januari	1	1	100	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	127,758,292				Januari	7,271,316	-	-
					Pebruari	1	1	100						Pebruari	16,490,132	14,871,316	90
					Maret	1	1	100						Maret	38,261,448	24,992,632	65
					April	1	1	100						April	45,532,764	32,263,944	71
					Mei	1	1	100						Mei	60,166,580	48,056,568	80
					Juni	1	1	100						Juni	67,437,896	60,827,880	90
					Juli	1	1	100						Juli	74,709,212	-	-
					Agustus	1	1	100						Agustus	91,480,528	68,099,192	74
					September	1	1	100						September	98,751,844	78,370,504	79
					Oktober	1	1	100						Oktober	111,215,660	8,921,816	8
					Nopember	1	1	100									
					Desember	1	1	100									
2	Tersusunnya Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan	4	Januari	1	1	100									
					Pebruari	-	-	-									
					Maret	-	-	-									
					April	-	-	-									
					Mei	-	-	-									
					Juni	1	-	-									
					Juli	-	-	-									
					Agustus	-	-	-									
					September	-	-	-									
					Oktober	-	-	-									
					Nopember	1	-	-									
					Desember	1	1	100									
3	Tersusunnya Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan	12	Januari	1	1	100									
					Pebruari	1	1	100									
					Maret	1	1	100									
					April	1	1	100									
					Mei	1	1	100									
					Juni	1	1	100									
					Juli	1	1	100									
					Agustus	1	1	100									
					September	1	1	100									
					Oktober	1	1	100									
					Nopember	1	1	100									
					Desember	1	1	100									
4	Tersusunnya Laporan Pembinaan, Pelayanan dan Inventarisasi	Jumlah Laporan Pembinaan, Pelayanan dan Inventarisasi	Laporan	12	Januari	1	1	100									
					Pebruari	1	1	100									
					Maret	1	1	100									
					April	1	1	100									

					r							r	8,318,750			-
					Oktober	-	-	-								
					Nopember	-	-	-								
					Desember	1	1	100								
8	Tersusunnya rencana kegiatan, capaian realisasi, pengumpulan serta pengolahan data Seksi Pemerintahan	Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan, capaian realisasi, pengumpulan serta pengolahan data Seksi Pemerintahan	Dokumen	5	Januari	1	1	100				Oktober	15,306,250	6,500,000	42	
					Pebruari	-	-	-								
					Maret	1	1	100								
					April	-	-	-								
					Mei	-	-	-								
					Juni	1	1	100								
					Juli	-	-	-								
					Agustus	-	-	-								
					Septembe r	1	1	100								
					Oktober	-	-	-								
					Nopember	-	-	-								
					Desember	1	1	100				Desember	24,175,000	-	-	
					Kinerja					Anggaran (Rp)						
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET	Kinerja	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengadministrasi Pemerintahan																
1	Penyusunan Laporan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan Desa	Laporan	3	Januari	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
					Pebruari	-	-	-				-	-	-	-	
					Maret	-	-	-				-	-	-	-	
					April	1	1	100				-	-	-	-	
					Mei	-	-	-				-	-	-	-	
					Juni	-	-	-				-	-	-	-	
					Juli	-	-	-				-	-	-	-	
					Agustus	1	1	100				-	-	-	-	
					Septembe r	-	-	-				-	-	-	-	
					Oktober	-	-	-				-	-	-	-	
					Nopember	-	-	-				-	-	-	-	
					Desember	1	1	100				-	-	-	-	

2	Penyusunan Laporan Kependudukan Kecamatan	Jumlah Laporan Kependudukan Kecamatan	Laporan	12	Januari	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-
					Pebruari	1	1	100	-	-	-	-	-	-	
					Maret	1	1	100	-	-	-	-	-		
					April	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Mei	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Juni	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Juli	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Agustus	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Septembe r	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Oktober	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Nopember	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Desember	1	1	100	-	-	-	-	-		
3	Penyusunan Laporan Keagrariaan	Jumlah Laporan Keagrariaan	Laporan	12	Januari	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-
					Pebruari	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Maret	1	1	100	-	-	-	-	-		
					April	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Mei	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Juni	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Juli	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Agustus	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Septembe r	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Oktober	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Nopember	1	1	100	-	-	-	-	-		
					Desember	1	1	100	-	-	-	-	-		
Pengadministrasi Ijin Usaha															

1	Pelaksanaan Pelayanan Perijinan, Sarana prasarana Fisik Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Administrasi Pelayanan Perijinan, Sarana prasarana Fisik Pelayanan Umum	Laporan	12	Januari	1	1	100	-	-	-	-	-	-
					Pebruari	1	1	100						
					Maret	1	1	100						
					April	1	1	100						
					Mei	1	1	100						
					Juni	1	1	100						
					Juli	1	1	100						
					Agustus	1	1	100						
					Septembe r	1	1	100						
					Oktober	1	1	100						
					Nopember	1	1	100						
					Desember	1	1	100						
					2	Pelaksanaan Tugas yang diberikan oleh atasan	Jumlah Tugas Lain yang dilaksanakan	Laporan						
Pebruari	1	1	100											
Maret	1	1	100											
April	1	1	100											
Mei	1	1	100											
Juni	1	1	100											
Juli	1	1	100											
Agustus	1	1	100											
Septembe r	1	1	100											
Oktober	1	1	100											
Nopember	1	1	100											
Desember	1	1	100											
Pengelola Monitoring dan Evaluasi														
1	Tersusunnya	Jumlah Laporan	Laporan	4	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Laporan Hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan	Hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan			Pebruari	1	1	100				-	-	-
					Maret	-	-	-				-	-	-
					April	-	-	-				-	-	-
					Mei	-	-	-				-	-	-
					Juni	1	-	-				-	-	-
					Juli	-	-	-				-	-	-
					Agustus	1	1	100				-	-	-
					Septembe r	-	-	-				-	-	-
					Oktober	1	1	100				-	-	-
					Nopember	-	-	-				-	-	-
					Desember	-	-	-				-	-	-
2	Tersusunnya Laporan Swadaya Murni Masyarakat	Jumlah Laporan Swadaya Murni Masyarakat	Laporan	4	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pebruari	-	-	-				-	-	-
					Maret	-	-	-				-	-	-
					April	1	-	-				-	-	-
					Mei	-	-	-				-	-	-
					Juni	-	-	-				-	-	-
					Juli	1	-	-				-	-	-
					Agustus	-	-	-				-	-	-
					Septembe r	1	1	100				-	-	-
					Oktober	-	-	-				-	-	-
					Nopember	-	-	-				-	-	-
					Desember	1	1	100				-	-	-
3	Tersusunnya Laporan Profil Desa dan Kecamatan	Jumlah Laporan Profil Desa dan Kecamatan	Laporan	4	Januari	1	1	100		-	-	-	-	-
					Pebruari	-	-	-				-	-	-

					Mei	-	-	-				-	-	-
					Juni	-	-	-				-	-	-
					Juli	-	-	-				-	-	-
					Agustus	-	-	-				-	-	-
					September	-	-	-				-	-	-
					Oktober	-	-	-				-	-	-
					Nopember	-	-	-				-	-	-
					Desember	-	-	-				-	-	-
2	Penyusunan Laporan Verifikasi Dokumen Desa Adat, Subak/Subak Abian secara periodik	Jumlah Laporan Verifikasi Dokumen Desa Adat, Subak/Subak Abian secara periodik	Laporan	12	Januari	1	1	100	-	-	-	-	-	-
					Pebruari	1	1	100				-	-	-
					Maret	1	1	100				-	-	-
					April	1	1	100				-	-	-
					Mei	1	1	100				-	-	-
					Juni	1	1	100				-	-	-
					Juli	1	1	100				-	-	-
					Agustus	1	1	100				-	-	-
					September	1	1	100				-	-	-
					Oktober	1	1	100				-	-	-
					Nopember	1	1	100				-	-	-
					Desember	1	1	100				-	-	-